



## Menyinari Sudut Kelam Tata Pemerintahan yang Lemah dan Korupsi

Oleh [Christine Lagarde](#)

22 April 2018



**Strategi antikorupsi membutuhkan reformasi regulasi dan kelembagaan yang lebih luas (Kritchanut/iStock).**

Dewan Eksekutif IMF baru saja mengesahkan rerangka baru [LINK] untuk meningkatkan keterlibatan mengenai tata pemerintahan dan korupsi di negara-negara anggota kami. Izinkan saya menjelaskan mengapa hal ini penting dan apa artinya bagi pekerjaan kami.

### **Beban dari korupsi**

Kita semua tahu bahwa korupsi yang mengakar merusak sendi-sendi ekonomi dan melemahkan kemampuan negara-negara untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Makalah yang baru saja kami terbitkan memaparkan hasil empiris yang menunjukkan bahwa korupsi yang tinggi berhubungan erat dengan pertumbuhan, investasi, FDI, dan penerimaan pajak yang jauh lebih rendah. Penurunan dari persentil ke-50 hingga ke-25 dalam indeks korupsi atau tata pemerintahan berkaitan dengan penurunan laju pertumbuhan PDB per kapita per tahun sebesar setengah poin persentase atau lebih, dan penurunan rasio investasi terhadap PDB sebesar 1½-2 poin persentase. Hasil kami juga menunjukkan bahwa korupsi dan tata pemerintahan yang buruk berhubungan dengan ketimpangan yang lebih tinggi dan pertumbuhan inklusif yang lebih rendah.

Tidak sulit untuk memahami temuan ini. Kita tahu bahwa korupsi memperlemah kemampuan pemerintah untuk mengumpulkan pajak, dan mendistorsi belanja dari investasi penting di bidang-bidang seperti kesehatan, pendidikan, dan energi terbarukan, ke proyek-proyek boros dengan keuntungan jangka pendek. Kita tahu bahwa korupsi berlaku bagaikan pajak atas investasi—atau lebih buruk lagi, karena tidak ada yang dapat memastikan tentang permintaan suap di masa depan. Kita juga tahu bahwa korupsi menyebabkan generasi muda enggan berinvestasi dalam keterampilan dan pendidikan—karena keberhasilan akan tergantung pada *siapa* yang Anda kenal bukan *apa* yang Anda tahu. Kita tahu bahwa korupsi merugikan orang miskin, menghalangi peluang ekonomi dan mobilitas sosial, merusak kepercayaan terhadap lembaga-lembaga, dan merusak kerekatan sosial. Korupsi merupakan rintangan utama dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*).

### **Peningkatan keterlibatan**

Mengingat semua hal ini, peningkatan keterlibatan IMF dalam melawan korupsi adalah amat beralasan dan tepat waktu. Penting diingat, upaya melawan korupsi ini akan menjadi bagian dari pekerjaan umum kami yang mempromosikan tata pemerintahan yang baik di bidang-bidang penting seperti manajemen keuangan publik, pengawasan sektor keuangan, dan anti pencucian uang.

Fokus yang lebih luas ini diperlukan. Kelemahan-kelemahan tata pemerintahan saja sudah berbahaya, tapi selain itu kelemahan-kelemahan tersebut juga membuka pintu bagi korupsi yang tersebar luas. Agar benar-benar efektif, strategi antikorupsi harus lebih dari sekadar memenjarakan pelakunya belaka. Strategi-strategi tersebut membutuhkan reformasi peraturan dan kelembagaan yang lebih luas. Pada akhirnya, “obat” yang paling mujarab untuk korupsi adalah kelembagaan yang kuat, transparan, dan akuntabel. Sebagaimana kata-kata terkenal Louis Brandeis, “sinar matahari konon adalah disinfektan terbaik; dan lampu jalan adalah polisi paling efisien.”

Manfaat tambahan dari pendekatan yang lebih luas ini: karena korupsi cenderung berkorelasi kuat dengan kelemahan yang lebih umum dalam tata pemerintahan dan

sering kali sulit diukur, kita dapat menggunakan kelemahan-kelemahan tata pemerintahan untuk membantu menguatkan penilaian tentang korupsi.

Perlu saya tekankan bahwa ini bukan topik baru bagi kami. Kami telah memiliki kebijakan tata pemerintahan yang berlaku sejak tahun 1997, dan ini adalah kebijakan yang baik—tinjauan kami menemukan bahwa prinsip-prinsipnya adalah prinsip-prinsip yang benar. Kebijakan ini menuntut kita untuk mengutamakan penanganan masalah tata pemerintahan dan korupsi ketika hal-hal tersebut memberikan dampak makroekonomi yang signifikan. Kebijakan ini menuntut kita untuk bekerja dengan lembaga-lembaga mitra (terutama Bank Dunia) di bidang-bidang keahlian mereka dan tidak ikut campur dalam politik atau dalam kasus-kasus penegakan individual.

Namun, meskipun prinsip-prinsip ini masuk akal, tinjauan kami menemukan bahwa implementasinya tidak merata. Kita tidak selalu menerapkan standar yang sama bagi seluruh anggota atas tindakan-tindakan serupa. Analisis kami terlalu sering tidak jelas.

Ini akan berubah. Saat ini kami telah mengadopsi rerangka untuk keterlibatan yang lebih diperkuat terkait tata pemerintahan dan korupsi yang bertujuan untuk mewujudkan pelibatan yang lebih *sistematis, tidak berat sebelah, efektif, dan terbuka* dengan negara-negara anggota.

Sebagai langkah pertama, kami mengembangkan metodologi yang jelas dan transparan untuk menilai sifat dan derajat kelemahan-kelemahan tata pemerintahan. Kita akan menilai beragam indikator—kualitas lembaga-lembaga terkait anggaran yang menangani perpajakan dan pengeluaran; kekuatan pengawasan sektor keuangan; integritas bank-bank sentral; transparansi dan ketidakberpihakan regulasi pasar; prediktabilitas aspek-aspek kepastian hukum yang vital bagi kesehatan ekonomi, terutama penegakan kontrak; dan rerangka yang memadai untuk memerangi pencucian uang dan pendanaan terorisme. Tentu saja, kami juga akan menilai derajat korupsi secara langsung.

Langkah berikutnya adalah menilai dampak ekonomi dari sendi-sendi lemah tata pemerintahan dan korupsi yang teridentifikasi ini dan memberikan rekomendasi kebijakan yang spesifik suatu negara sebagai tanggapannya. Yang juga penting, kita akan mempertimbangkan hal ini untuk jangka waktu yang lebih lama, mengingat bahwa tata pemerintahan yang buruk dan korupsi merugikan ekonomi tidak hanya melalui gangguan jangka pendek tetapi juga melalui pembusukan kelembagaan secara perlahan. Untuk program peminjaman kami, kami akan melihat apakah masalah-masalah yang ada menghambat kemampuan negara untuk menjalankan reformasi ekonomi mereka.

### **Sisi penawaran dari korupsi**

Ada satu elemen tambahan. Adalah suatu kebenaran mendasar bahwa—meminjam kata-kata Milton Friedman—korupsi selalu dan di mana saja adalah fenomena dua sisi. Di balik setiap suap yang diterima ada suap yang diberikan. Dan dana-dana yang diterima melalui korupsi sering kali adalah dana-dana yang disembunyikan di luar negeri—sering di sektor-sektor keuangan di kota-kota besar. Adalah sangat mungkin bahwa suatu negara memiliki “tangan yang bersih” di dalam negeri namun “tangan yang kotor” di luar negeri.

Maka dari itu, untuk memerangi korupsi dengan sungguh-sungguh kita perlu menangani fasilitasi praktik-praktik korupsi oleh aktor-aktor swasta. Untuk dapat melakukan hal ini, kami akan mendorong negara-negara anggota kami untuk secara sukarela memberikan kesempatan kepada IMF untuk menilai kerangka hukum dan kelembagaan mereka—untuk melihat apakah sudah ada kriminalisasi dan penuntutan terhadap suap yang dilakukan di negara lain (*foreign bribery*) dan apakah ada mekanisme-mekanisme untuk menghentikan tindak pencucian dan penyembunyian asal-usul uang yang kotor. Saya merasa bersyukur karena sembilan negara—yakni seluruh anggota G7 ditambah Austria dan Republik Czech—telah mengajukan diri untuk kajian ini. Hal ini merupakan tanda keyakinan yang penting terhadap rerangka baru tersebut.

Dengan adanya dukungan penuh dari anggota-anggota kami, kini kami harus melangkah ke implementasi. Dalam pengawasan dan program peminjaman kami, Anda akan melihat adanya peningkatan penilaian dan diskusi tentang tata pemerintahan dan korupsi. Kami juga akan meningkatkan pengembangan kapasitas kami dalam bidang-bidang tersebut untuk membantu negara-negara memperkuat rerangka regulasi dan kelembagaan mereka.

Tujuan kami di sini adalah menjadi terbuka, saksama, transparan, danimbang. Pada gilirannya, hal ini diharapkan dapat meningkatkan kredibilitas dan memungkinkan kami untuk melakukan tugas dengan lebih baik.

Mengingat kembali apa yang pernah dikatakan Brandeis, saya yakin bahwa penguatan keterlibatan ini akan berdampak pada tata pemerintahan dan korupsi seperti halnya investasi dalam teknologi tenaga surya berdampak pada lingkungan hidup—memanfaatkan kekuatan sinar matahari untuk menempatkan ekonomi global pada jalur yang lebih sehat dan lebih berkelanjutan. Jika hal ini berjalan sesuai rencana, seharusnya jumlah ruang-ruang gelap dan tersembunyi di mana korupsi dapat berbiak akan semakin berkurang.

\*\*\*\*\*



**Christine Lagarde** adalah Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional. Setelah menjabat periode lima tahun pertamanya, ia kembali ditunjuk pada bulan Juli 2016 untuk masa jabatan kedua. Ia adalah warga negara Prancis yang sebelumnya adalah Menteri Keuangan Prancis dari bulan Juni 2007 hingga Juli 2011, dan juga pernah menjabat sebagai Menteri Negara Perdagangan Luar Negeri Prancis selama dua tahun.

Christine Lagarde juga memiliki karir panjang dan penting sebagai pengacara anti-monopoli dan tenaga kerja, menjadi partner pada firma hukum internasional Baker & McKenzie, di mana ia dipilih sebagai ketua pada bulan Oktober 1999. Ia memegang posisi tertinggi di firma hukum tersebut hingga bulan Juni 2005 ketika ia ditunjuk untuk jabatan pertamanya sebagai menteri di Prancis. Christine Lagarde memegang gelar dari Institute of Political Sciences (IEP) dan dari Fakultas Hukum Universitas Paris X, di mana ia juga mengajar sebelum bergabung dengan Baker & McKenzie pada tahun 1981.